

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk kerjasama ekonomi, ASEAN terus berupaya dalam memajukan dan menggerakkan perekonomian kawasan regional yang berdasarkan kepada *Blueprint* ASEAN, antara lain memprakarsai terbentuknya *The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dengan Tiongkok, Korea, Jepang, India, dan Selandia Baru. Pembentukan RCEP dilandasi oleh konsep filosofis dan *strategic* melalui kerjasama *Free Trade Agreement (FTA)* yang dilakukan ASEAN bersama dengan mitra yang dipercaya akan memberikan potensi ekonomi dari integrasi pasar dan membentuk suatu kawasan ekonomi yang menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan nilai sebesar USD 20 triliun. ASEAN meningkatkan Sentralitas melalui RCEP melalui suatu bentuk proses integrasi dan juga beberapa pendekatan yang akan berpengaruh kepada kesejahteraan bagi negara anggota.

ASEAN sangat menjunjung tinggi *balance of power* dan membentuk sejumlah kerangka kerjasama bilateral yang terpusat di Asia Timur. Pembentukan kerjasama RCEP ini juga merupakan bentuk dari berlomba-lombanya organisasi Kawasan untuk membentuk kerjasama perdagangan atau ekonomi yang lebih sejalan dengan kebutuhan regionalnya. Tidak berjalannya rencana dari pembentukan *World Trade Organizations (WTO)* sebagai organisasi yang secara khusus menangani permasalahan

dan aktivitas perdagangan internasional menjadi dasar banyaknya kerjasama yang dilakukan dalam satu regional seperti RCEP dan TPP¹

Gagasan RCEP muncul ketika Indonesia menjadi Pemimpin ASEAN pada tahun 2011. Gagasan tersebut muncul setelah Indonesia mendapatkan tekanan dari beberapa mitra yang tergabung dalam *Free Trade Agreement (FTA)* khususnya Tiongkok dan Jepang. Tiongkok dan Jepang menginginkan agar ASEAN membentuk suatu FTA yang melibatkan seluruh mitranya yaitu Tiongkok, Korea, Jepang Australia, India, dan Selandia Baru. Di masa kepemimpinan Indonesia sebagai ketua ASEAN di tahun 2011, Indonesia berhasil mendorong negara anggota ASEAN untuk secara kolektif mewujudkan gagasan RCEP dan menawarkan gagasan ini kepada seluruh negara yang tergabung di dalam FTA. Dengan disepakatinya gagasan RCEP ini, di tahun 2012 para Kepala ASEAN bersama dengan mitranya mengumumkan akan melakukan perundingan RCEP yang intensif di tahun 2013 dan secara bersama menyepakati *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership* yang merupakan acuan dalam menjalankan perundingan RCEP².

Tiongkok merupakan salah satu mitra yang menginisiasi dibentuknya FTA RCEP. Jika ditarik ulur ke belakang, kasus serupa pernah terjadi saat proses

¹Parna, Dedi. “Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan Regional Comprehensive Economy Partnership.” Jom FISIP Volume 4 NO. 1 (Februari, 2017): 7-10.

² Gultom, D. (2020, November 25). *Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal*. Retrieved from Center for Indonesian Policy Studies : <https://www.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-perjanjian-rcep-peluangnya-bagi-indonesia-langka>

dibentuknya *Trans Pacific Partnership* (TPP) yang dimana pada saat itu Amerika Serikat berusaha memimpin proses berjalannya perundingan TPP. Aksi *Pivot to Asia* yang dilakukan oleh AS memiliki tujuan untuk memberikan pengaruhnya kepada negara kawasan Asia Pasifik. Selain sikap aktif AS dalam FTA tersebut, AS memberikan pengaruh yang signifikan dengan mendominasi FTA.

Selain itu, AS juga menjadikan liberalisasi TPP lebih komprehensif serta menaikkan standar yang tinggi dengan mengikuti aturan WTO. AS yang memiliki konflik perang dagang dengan Tiongkok tidak membuang kesempatannya untuk berusaha mengajak Jepang bergabung dalam TPP dengan mengirimkan Undangan. Mengingat Jepang juga sedang berkonflik dengan Tiongkok. Tiongkok melakukan *counter balance* sebagai respon terhadap hegemoni AS di kawasan Asia Pasifik melalui TPP. RCEP menjadi media Tiongkok untuk memberikan citra positif dan menguatkan hubungannya dengan negara-negara kawasan ASEAN.³

Pada tahun 2013 menjadi perundingan RCEP yang pertama kali. Perundingan tersebut dilaksanakan di Brunei Darussalam dan berlangsung dengan beberapa tahapan dan berakhir pada November 2020 yang dimana dipimpin oleh Indonesia. Dalam pertemuan ini Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Komite Perundingan RCEP yang juga merangkap sebagai Koordinator ASEAN. Perundingan RCEP ini memiliki beberapa tantangan dari anggotanya karena beberapa negara peserta RCEP masih dikategorikan sebagai negara berkembang yaitu Laos, Kamboja, dan Myanmar. Sebaliknya mitra

³Pratama MF, dkk. "Motif dan Kepentingan Tiongkok dalam Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)" Vol. 6, No. 1 (Januari, 2022): 1837-1840.

FTA sudah masuk dalam kategori negara maju yaitu Korea, Australia, Jepang, dan Selandia Baru.

Kesepakatan perundingan RCEP ini pada akhirnya tercapai setelah melalui berbagai pertimbangan dari semua negara, pertimbangan-pertimbangan tersebut bertujuan untuk menyepakati isi dari perjanjian RCEP dan suatu hasil yang menguntungkan semua anggota. Adapun isi dari perjanjian RCEP ini terdiri dari: *Initial Provisions and General Definitions*(1), *Trade in Goods*(2), *Rules of Origin*(3), *Customs Procedures and Trade Facilitation*(4), *Sanitary and Phytosanitary Measures* (5), *Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment* (6) *Trade Remedies* (7), *Trade in Services including Annexes on Financial, Telecommunication and Professional Services*(8), *Movement of Natural Persons*(9), *Investment*(10), *Intellectual Property*(11), *Electronic Commerce*(12), *Competition*(13), *Small and Medium Enterprises*(14), *Economic and Technical Cooperation*(15), *Government Procurement*(16), *General Provisions and Exceptions*(17), *Institutional Provisions*(18), *Dispute Settlement*(19), *Final Provisions*(20).

Pembentukan dari kerjasama RCEP merupakan bentuk dari komitmen negara-negara anggotanya untuk membuka akses pasar dari Barang, jasa, investasi dan juga pergerakan manusia. Dimana hal-hal tersebut tertuang di dalam lampiran dalam perjanjian RCEP, yaitu: *Schedules of Tariff Commitments*(1), *Schedules of Specific*

*Commitments on Services(2), Schedules of Reservations and Non-Conforming Measures for Services and Investment(3).*⁴

Adapun manfaat dari RCEP yaitu:

1. Terbukanya Akses Pasar

Sejak disepakatinya gagasan ini, ASEAN memiliki pandangan terhadap perekonomian kawasan belum sepenuhnya akan berdampak secara signifikan. Hal tersebut dilandasi karena manfaat yang akan dihasilkan hanya akan dirasakan dari salah satu perjanjian yang sudah ada yaitu *FTA*. Melalui RCEP ini diharapkan adanya tambahan terhadap terbukanya akses pasar sehingga *spill-over effect* dapat dirasakan oleh mitra *FTA* dan hubungan bilateral dengan negara-negara RCEP dan non RCEP yang merupakan bukan negara yang terdaftar di dalam perjanjian RCEP sendiri.

2. Masuknya Investasi Asing

Melalui perjanjian RCEP diharapkan dapat untuk mendukung pertumbuhan nilai investasi modal asing untuk perkembangan sektor industry baru yang memiliki potensial. Negara yang dinilai dapat memanfaatkan peluang ini yaitu negara dengan dukungan infrastruktur yang mampu menguntungkan investor atau mengarah kepada negara-negara dengan perkembangan Revolusi

⁴ Gultom, D. (2020, November 25). *Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal*. Retrieved from Center for Indonesian Policy Studies : <https://www.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-perjanjian-rcep-peluangnya-bagi-indonesia-langka>

Industri 4.0. ASEAN sendiri dinilai memiliki peluang yang cukup besar dalam sektor industri digital sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari RCEP⁵.

Manfaat RCEP bagi Indonesia dinilai dapat memberikan dampak positif dan juga negatif terhadap perekonomian domestik. Dampak positif akan dirasakan dengan adanya peningkatan kesejahteraan. Namun disaat yang bersamaan dampak negatif pun akan hadir dengan perdagangan Indonesia yang akan mengalami defisit dengan sesama negara anggota RCEP lainnya. Oleh karena hal tersebut, Indonesia harus mampu untuk meningkatkan kemampuannya dan juga harus bisa untuk memanfaatkan keuntungan seperti dengan adanya *Regional Value Chain (RVC)* RCEP karena Indonesia merupakan negara yang berperan cukup signifikan dalam aktivitas ekspor dan impor dari dan ke kawasan RCEP.

Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan telah melakukan kajian mengenai dampak dari RCEP terhadap Indonesia dan hasilnya menunjukkan bahwa RCEP berdampak pada meningkatnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 0,5% periode 2021-2032. Meskipun peningkatan ini lebih kecil dibandingkan dengan negara RCEP lainnya seperti Vietnam, Korea, Thailand dan Malaysia.⁶ Melihat hal tersebut tidak ada pilihan lain bagi Indonesia untuk tetap tergabung di dalam RCEP.

⁵ Gultom, D. (2020, November 25). Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal. Retrieved from Center for Indonesian Policy Studies : <https://www.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-perjanjian-rcep-peluangnya-bagi-indonesia-langka>

⁶ Arbar, T. F. (2020). Mengenal Perjanjian Dagang RCEP yang Katanya Untungkan China. Jakarta <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201116073751-4-201987/mengenal-perjanjian-dagang-rcep-yang-katanya-untungan-china/2>

Spillover Effect dari FTA yang dimiliki oleh anggota RCEP dengan negara non-RCEP juga dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia dari perluasan peranan Indonesia dalam *Global Supply Chain*. Manfaat RCEP bagi negara-negara anggota ASEAN tidak sebanding dengan apa yang akan didapatkan oleh negara-negara mitra karena telah terbukanya pasar dalam ASEAN+1 FTAs. Hal ini berdampak kepada anggota ASEAN khususnya Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja dan juga Vietnam yang akan mengalami peningkatan impor dan berdampak langsung pada defisit perdagangan yang cukup besar.

Jika ingin mendapat manfaat ekonomi, Indonesia dan negara ASEAN lainnya harus melakukan perlindungan yang bersifat struktural dan membentuk kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing terhadap ekonomi nasional⁷. Terwujudnya pembentukan RCEP ini tentunya akan menghasilkan atau menghadirkan dampak yang akan dirasakan secara langsung dan juga tidak langsung terhadap struktur yang sudah ada, juga terhadap rantai pasokan dan akan meningkatkan ketergantungan antara negara yang menjadi anggota RCEP dan diluar RCEP. Perjanjian ini memiliki manfaat ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dan timbali balik perjanjian ini akan memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi yang berdasarkan kepada FTA yang sudah berjalan.

Pemberlakuan kerjasama RCEP juga akan menghasilkan terbukanya akses pasar yang dimana hal ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia dan

⁷Ibid.

Tiongkok. Kesiapan industry nasional akan menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia agar mendapatkan manfaat yang optimal dari RCEP untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Indonesia dirasa perlu untuk mendorong nilai investasi lokal dan asing yang berguna untuk meningkatkan jumlah produk yang berdaya saing, sehingga mampu memanfaatkan pasar di negara-negara peserta RCEP yang dimana sangat menjanjikan untuk Indonesia⁸.

Didukung oleh sistem liberalisasi perdagangan yang dianut oleh ASEAN akan menghasilkan dan memastikan kelancaran arus barang terhadap pasokan bahan baku dan hal ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam logistic perdagangan elektronik. Melalui liberalisasi Indonesia menghadapi tantangan tidak hanya di lingkup domestik maupun internasional. Pada saat ini kinerja dari aktivitas impor Indonesia masih belum mencerminkan Indonesia sebagai negara dengan penghasil bahan baku terbesar. Posisi Indonesia masih berada dibawah Malaysia dan Singapura.

Jika kondisi ini tidak diperbaiki maka akan menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dari produk-produk yang diciptakan cenderung sama dan monoton. Menanggapi hal ini Indonesia harus lebih teliti dalam melihat peluang dan tantangan dikarenakan Indonesia memiliki sumber daya alam

⁸Gultom, D. (2020, November 25). Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal. Retrieved from Center for Indonesian Policy Studies : <https://www.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-perjanjian-rcep-peluangnya-bagi-indonesia-langka>

yang lebih jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Melalui RCEP ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar menawar dalam perekonomian global dan mampu bersaing dengan blok-blok di luar Asia⁹. Begitu juga dengan Tiongkok, yang pada dasarnya merupakan negara eksportir terbesar di dunia.

Ditinjau dari nilai total, Tiongkok berada di urutan pertama menjadi negara pengekspor teratas. Pada tahun 2021 nilai total yang dihasilkan oleh Tiongkok sebesar US\$3,026,233,691,000. Dengan hal ini, bergabungnya Tiongkok dalam perjanjian RCEP dipastikan mendapatkan manfaat yang besar karena RCEP memberikan kontribusi utamanya dalam sektor perdagangan barang.¹⁰ Peningkatan akses pasar yang ditingkatkan oleh RCEP melalui penghapusan tarif dan kuota lebih dari 65% dari perdagangan barang tersebut dapat mempermudah Tiongkok dalam melebarkan ekspansi nya di negara-negara anggota yang tergabung dalam perjanjian tersebut.

Selain itu manfaat lain yang didapatkan Tiongkok diantaranya adalah terimplementasi pada geopolitiknya yang mendapatkan kemenangan secara signifikan sehingga melahirkan sikap saling bergantung dalam hal ekonomi antara Tiongkok dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Peluang bisnis Tiongkok pun mendapatkan keuntungan yang signifikan karena Tiongkok memiliki dominasi terbesar dalam sektor ekonomi di kawasan RCEP.¹¹

⁹ Parna, D. (2017). Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan Regional Comprehensive Economy Partnership

¹⁰ www.worldstopexports.com/worlds-top-export-countries/

¹¹ Pratama MF, dkk, Loc.Cit.

Selain berdampak langsung pada perekonomian Indonesia, Indonesia juga menghadapi tantangan langsung dari RCEP, adapun tantangan tersebut antara lain:

1. Mendorong peningkatan logistik nasional terhadap barang dan jasa.
2. Memperkuat struktur ekonomi nasional melalui 3 aspek yaitu logistik, perdagangan dan investasi.
3. Menurunkan biaya ekonomi dan juga memperbaiki logistik nasional.
4. Memperbaiki peraturan dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing¹².

Perundingan di dalam RCEP sendiri menitikberatkan pada upaya integrasi ekonomi khususnya pada perdagangan barang, jasa, dan investasi. *E-commerce* salah satunya menjadi isu yang dibahas di dalam perundingan. Kesiapan Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal yang kemudian hal ini membuat Indonesia sangat berhati-hati secara dalam mengakses pasar via elektronik. Hal ini dilakukan Indonesia karena pada saat ini Indonesia sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai perdagangan berbasis elektronik.¹³

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara memiliki posisi sentral dalam mewujudkan RCEP sehingga menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk bernegosiasi langsung untuk menghasilkan kesepakatan kebijakan yang dapat mendukung perkembangan ekonomi Indonesia, ditambah lagi dengan

¹² Indonesia for Global Justice. (2017). Tantangan RCEP mendongkrak ekspor. Jakarta : <https://igj.or.id/tantangan-rcep-mendongkrak-ekspor/>

¹³ Parna, D. (2017).

kehadiran Tiongkok, Jepang, Korea dan Indonesia sebagai negara industri menjadi peluang emas bagi pasar dan ekonomi Indonesia kedepannya. Pengusaha lokal Indonesia mayoritas terdiri dari 95% Usaha Kecil Menengah yang membuat Indonesia mengusulkan RCEP agar lebih melibatkan UKM baik dalam rantai pasok kawasan ataupun global.

Melalui integrasi UKM yang diikutsertakan di dalam perjanjian RCEP ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia yang secara langsung akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi Kawasan Asia tenggara¹⁴. Pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* bertujuan untuk memperkuat integrasi Kawasan Asia Tenggara. Kerjasama yang digagas oleh ASEAN ini merupakan usahanya untuk menjadi aktor utama dalam perkembangan perekonomian di Kawasan Asia Tenggara bersama 6 negara lainnya. Proposal pembentukan RCEP ini menjadi yang pertama di dalam sejarah Kawasan yang bertujuan untuk menandingi adanya forum kerjasama lain yaitu *Trans-Pacific Partnership (TPP)* yang diinisiasi oleh Amerika Serikat pada era Presiden Obama dengan memiliki kebijakan yaitu *Pivot to Asia*.

Realisasi dari forum kerjasama ini menghasilkan perdebatan dalam proses integrasi regional karena belum mencapainya kohesi yang kuat di Kawasan Asia.¹⁵ Regionalisme di Kawasan Asia memiliki karakter yang berbeda dengan

¹⁴Ibid.

¹⁵Yudono, R. M. (2020). Respon ASEAN Terhadap Mundurnya India Dari Kerja Sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). *Jurnal Hubungan Internasional* , 185-188.

beberapa Kawasan lainnya. Menurut Katzenstein mengatakan bahwa karakter regional di Kawasan Asia dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi pasar dibandingkan dengan peranan dari institusi regionalnya . Belum terealisasinya forum kerjasama regional ini dilatar belakangi karena adanya beberapa hambatan seperti belum kuatnya norma hukum internasional menjadi salah satu penghambat dari setiap usaha integrasi di Kawasan Asia, terdapat motif politik dalam proses negosiasi RCEP dan masih terdapatnya kesenjangan dalam aspek infrastruktur di beberapa negara anggota ASEAN¹⁶.

Ketika resmi dibentuk pada November 2012, forum kerjasama RCEP akan terus mengembangkan fokus dalam aktivitas perdagangan Internasional seiring dengan berkembangnya dan berubahnya dinamika perekonomian global. Akibat adanya efek dari liberalisasi perdagangan dan kemajuan teknologi yang bisa menjadi faktor pendukung dalam aktivitas perdagangan, dalam forum RCEP yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Agustus 2019 memfokuskan pembahasan mengenai substansi dalam perdagangan digital (*e-commerce*). Perdagangan digital menjadi salah satu aktivitas yang akan semakin berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

Aktivitas yang berbasis teknologi ini dirasa akan menjadi keunggulan dalam meningkatkan aktivitas perdagangan dengan skala yang lebih luas. Indonesia sebagai negara berkembang dan tergabung dalam kerjasama RCEP dengan beberapa negara lainnya melihat bahwa perdagangan digital menjadi peluang bagi mereka untuk

¹⁶Ibid

meningkatkan pendapatan dari sektor perdagangan¹⁷. Indonesia menjadi pasar terbesar industry *e-commerce* dimana bisa dilihat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 nilai transaksi dari perdagangan digital di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Gambar 1.1 Nominal Transaksi E-Commerce (2017-2020)



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/29/nilai-transaksi-e-commerce-mencapai-rp-2663-triliun-pada-2020>

Perkembangan perdagangan digital atau *e-commerce* pada saat ini menjadi industry yang berkembang sangat signifikan. Negara-negara anggota ASEAN yang mayoritas masih menjadi negara berkembang bisa dikatakan sangat mendominasi perkembangan perdagangan digital di dunia. Indonesia merupakan negara dengan

¹⁷ Sitinjak, N. L. (2019). Perkembangan E-commerce dalam Perundingan RCEP. Jakarta : <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/perkembangan-e-commerce-dalam-perundingan-rcep/>.

tingkat perkembangan *e-commerce* terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Perkembangan industri *e-commerce* di Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 2010 dan terus mengalami peningkatan sampai hingga saat ini. Kemunculan perdagangan digital atau *e-commerce* merupakan hal yang perlu di cermati secara seksama.

Kemudahan yang diberikan dalam aktivitas perdagangan menggunakan internet ini harus diikuti dengan perkembangan dalam pemberdayaan UMKM lokal agar mampu bersaing dengan produk luar. Perundingan dalam menentukan regulasi perdagangan digital atau *e-commerce* dalam kerjasama RCEP mengalami tarik ulur dari setiap pertemuan yang dilakukan. Pada tanggal 23-30 Agustus 2019 bertempat di ASEAN Secretariat, beberapa negara anggota mengadakan *Working Group on E-Commerce (WGEC)* untuk membahas point-point yang masih jadi penghambat sebelum disahkan pada pertemuan di Vietnam pada September 2019.

Dalam pertemuan ini, terdapat beberapa isu penting yaitu berhubungan dengan beberapa definisi dari “*Article 1 (Definitions) covered person, Article 5 (Relation to other chapters) Article 20 (Promotion of skills Relevant for Electronic Commerce) dan Article 13 (Transparency)*”. Dalam pertemuan ini belum menyepakati keputusan final mengenai perdagangan digital dan diperlukan pembahasan lanjutan untuk disahkan dalam WGEC selanjutnya pada September 2019 di Vietnam¹⁸.

Kerjasama RCEP dinilai akan memberikan tantangan tersendiri bagi produk-produk dalam negeri terutama kepada pengusaha UMKM yang masih kurang

¹⁸Sitinjak, N. L. (2019). Perkembangan E-commerce dalam Perundingan RCEP. Jakarta : <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/perkembangan-e-commerce-dalam-perundingan-rcep/>

diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia masih terlena dengan membuka pintu masuk selebar-lebarnya bagi produk-produk asing untuk masuk ke pasar Indonesia tetapi masih melupakan produk dalam Negeri atau UMKM yang seharusnya diberdayakan agar mampu bersaing dengan produk asing. Dengan dibentuknya RCEP yang mulai memfokuskan kepada perdagangan digital, tentunya akan memberikan tantangan bagi UMKM lokal.

Pertama, dengan adanya perjanjian ini akan mendorong semakin banyaknya produk-produk impor masuk ke dalam negeri dan dijual pada platform *e-commerce* di Indonesia. Kedua, adanya strategi *predatory pricing*. *Predatory pricing* merupakan strategi untuk menetapkan harga yang berada dibawah pasaran. Ketiga, keamanan data pelanggan apabila berbelanja menggunakan platform *e-commerce* lintas negara¹⁹. Digitalisasi ekonomi pada saat ini telah mengambil peranan penting dalam perekonomian Internasional akibat adanya efek dari kemajuan teknologi dan globalisasi.

Kemunculan perdagangan digital atau *e-commerce* dapat dilakukan dengan sangat mudah antar lintas negara menggunakan suatu platform. Indonesia sebagai negara berkembang telah memiliki banyak sekali perusahaan dagang yang berbasis digital untuk memberikan kemudahan bagi para pelanggan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Peningkatan *e-commerce* disuatu negara tentunya dilatar belakangi oleh

¹⁹Burhan, F. A. (2021). RI Ikut Perjanjian Dagang Regional, UMKM Online Hadapi Tiga Tantangan. Jakarta : <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/605481b925077/ri-ikut-perjanjian-dagang-regional-umkm-online-hadapi-tiga-tantangan>.

masyarakat yang menggunakan internet. Di Indonesia sendiri jumlah pengguna internet terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sebesar 27 juta jiwa²⁰.

Meningkatnya perkembangan perdagangan digital atau *e-commerce* di Indonesia diprediksi akan terus meningkat jika dilihat dari kebutuhan masyarakat dan perkembangan digitalisasi. Indonesia telah dilirik oleh negara-negara besar yang bergabung dalam kerjasama RCEP sebagai pasar utama perdagangan digital. Tiongkok sebagai negara yang sudah lebih dulu mengembangkan perdagangan digital telah melakukan ekspansi ke Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari mulai banyaknya perusahaan perdagangan digital atau *e-commerce* asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia. Lazada sebagai perusahaan *holding* dari Alibaba grup telah lama beroperasi di Indonesia²¹.

Bergabungnya Indonesia dan Tiongkok dalam kerjasama *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* memberikan kemudahan bagi kedua negara dalam menjalani kerjasama bilateral secara khusus dalam perkembangan industri perdagangan digital atau *e-commerce*. Usaha kerjasama dari RCEP untuk menghapus hambatan dalam aktivitas perdagangan regional akan memberikan dampak

²⁰Riyanto, G. P. (2021, 02 23). Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta. <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>

²¹Saraswati, P. (2018). China makin ekspansif ke pasar e-commerce Indonesia. <https://industri.kontan.co.id/news/china-makin-ekspansif-ke-pasar-e-commerce-indonesia>

yang cukup baik bagi Indonesia apabila dicermati dengan baik. Tiongkok sebagai negara produsen dari berbagai macam produk bisa dijadikan mitra strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan digital.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan suatu negosiasi *Free Trade Agreement* yang disepakati oleh 16 negara yaitu terdiri dari 10 negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam) dan 6 negara mitra dagang ASEAN ± Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Sehubungan dengan RCEP enam negara non-ASEAN ini dikenal sebagai *ASEAN Free Trade Partners (AFP)*. Para peserta dari negosiasi RCEP memiliki populasi dengan total lebih dari 3 milyar orang dan pangsa perdagangan yang diperkirakan 27% dari perdagangan global.

RCEP sendiri mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa/masalah hukum kelembagaan dan isu-isu lain yang perlu diidentifikasi selama proses negosiasi. RCEP sendiri memiliki strategi yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan regional dengan cara memastikan pasar negara-negara yang berpartisipasi tetap terbuka dan kompetitif.²² Partisipasi Tiongkok dalam pembentukan RCEP memiliki kepentingan dalam rangka memperluas akses pasar di Asia terutama di ASEAN dan Asia Timur.

²²Randy Aulia Isan. "Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Dalam Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep)." JOM FISIP Vol. 4 No. 1 (Februari, 2017): 6-7.

Asas-asas RCEP yang merupakan bentuk dari sebuah perjanjian internasional memiliki fokus pada kerjasama ekonomi yang secara tidak langsung dapat menjadi awal terbentuknya integrasi ekonomi di kawasan Asia dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan pada perdagangan, memberi kemudahan pada interaksi ekonomi antar negara anggota dan juga memberikan akses yang luas kepada pasar.²³ Bila kesepakatan RCEP berlaku maka akan lebih dari 30 persen PDB dunia yang berpotensi pasar sebesar USD21,6 triliun akan jatuh di kawasan ini karena 50 persen dari populasi dunia berada di kawasan RCEP.

Hal tersebut akan berpotensi pada konsumen atau pasar yang sangat menjanjikan dan diperkirakan 30 persen perdagangan dunia akan berada di kawasan ini. Namun, bagi Indonesia terdapat beberapa efek negatif yang harus segera diselesaikan demi memanfaatkan forum RCEP secara optimal. RCEP pada dasarnya tidak membuat pertambahan pasar yang baru di kawasan regional ASEAN melainkan hanya menciptakan pasar baru antar negara mitra ASEAN seperti Australia, Cina, India, Jepang, Korea, dan Selandia Baru.

Terbukanya akses pasar dengan mitra ASEAN diharapkan akan dapat meningkatkan perdagangan intra negara mitra ASEAN sehingga memiliki dampak kepada pertumbuhan ekonomi kawasan regional pada umumnya dan ASEAN pada khususnya. Selain itu, salah satu manfaat lain yang juga diharapkan dengan adanya forum ini adalah adanya kemudahan bagi negara anggota RCEP untuk mendapatkan

²³Ibid, Hal 4.

pasokan bahan baku.²⁴ Adanya *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* secara tidak langsung memberikan kemudahan bagi Tiongkok dalam membuat tatanan Geo-ekonomi baru yang Asia-Sentris.

Hal tersebut ditandai dengan penggunaan alat ekonomi dalam mencapai tujuan strategis. Karena pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik terus meningkat setelah adanya kesepakatan RCEP ini. Dari kesepakatan RCEP ini penerima manfaat terbesar adalah Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan melalui kerja sama ekonomi baru, disamping itu ASEAN sendiri sudah memiliki kerja sama perdagangan dengan ketiga negara tersebut. RCEP sebagian besar dibangun melalui perjanjian secara sepihak dengan mitra dagangnya yang bertujuan untuk menciptakan satu blok besar dalam rangka meningkatkan interaksi perdagangan.²⁵

Pada saat ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan industri *e-commerce*. Pemerintah Indonesia melihat adanya peluang bagi produk lokal untuk menembus pasar Tiongkok dengan adanya perdagangan digital dan poin-poin yang ada dalam kesepakatan RCEP²⁶. Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas, dari kerjasama yang dijalankan oleh ASEAN bersama 6 negara dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership*

²⁴Ragimun. "Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum Rcep Bagi Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol. 09 No. 1 (Juni, 2018): 74.

²⁵Pratama MF, dkk, *Op.Cit.*, hal. 1840.

²⁶Puspa, A. W. (2016). *China-Indonesia Perdalam Kerja Sama Perdagangan dan Keuangan* Artikel ini telah tayang di *Bisnis.com* dengan judul "China-Indonesia Perdalam Kerja Sama Perdagangan dan Keuangan. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160902/9/580895/china-indonesia-perdalam-kerja-sama-perdagangan-dan-keuangan>

(RCEP) tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam aktivitas perdagangan regional.

Selain itu, dengan memasukan perdagangan digital atau *e-commerce* sebagai salah satu fokus dalam kerjasama RCEP juga diprediksi akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi kemajuan *e-commerce* di Indonesia. Tetapi, hal tersebut bisa dilakukan apabila Pemerintah tetap memperhatikan produk-produk lokal agar mampu terus berkembang dan bersaing di pasar Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan perdagangan digital atau *e-commerce* telah menjadi industri yang pada saat ini mengalami perkembangan secara drastis. Kemajuan perdagangan digital di Indonesia dilatar belakangi karena tingginya pengguna internet di Indonesia dan juga meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia. Perdagangan digital atau *e-commerce* telah memberikan kemudahan bagi para pelanggannya untuk melakukan belanja dengan menggunakan suatu platform. Dengan adanya kerjasama *The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* yang salah satu fokusnya adalah untuk mengembangkan industri perdagangan digital, negara-negara anggotanya akan menghasilkan dampak yang positif bagi Indonesia.

Ditambah lagi dengan adanya Tiongkok dalam kerjasama tersebut tentunya akan menambah keuntungan tersendiri bagi Indonesia dimana Indonesia menjadi pasar utama bagi produk Tiongkok dan menjadi negara tujuan investor Tiongkok yang salah satunya tercermin dari hadirnya platform lazada di Indonesia. Diluar dari segudang

keuntungan yang telah di gadang-gadang, pada implementasinya proses ratifikasi perjanjian ini berangsur sangat lama dari mulai 2012-2020. Oleh karena itu, di dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang penulis akan ambil yaitu:

1.2.1 Pertanyaan utama : Mengapa Indonesia dan Tiongkok bekerjasama dalam industri *e-commerce* yang berbasis ekonomi digital?

1.2.2 Pertanyaan *Operasional* :

1. apakah kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam industri *e-commerce* menghasilkan keuntungan?
2. Apa saja manfaat dan hambatan yang akan diperoleh dari kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam industri *e-commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menjelaskan Implementasi Kerjasama Industri E-Commerce Indonesia – Tiongkok Berbasis Ekonomi Digital yang di dalamnya juga tercantum keuntungan apa saja yang akan di dapatkan oleh Indonesia dan Tiongkok serta hambatan yang dilalui.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan dalam penelitian ini dapat berguna bagi peneliti baru mengenai keuntungan yang didapatkan Indonesia dalam kerjasama *The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Selain

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik. Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini yaitu :

- a. Bertambahnya wawasan dan juga ilmu bagi peneliti mengenai Implementasi Kerjasama Industri E-Commerce Indonesia – Tiongkok Berbasis Ekonomi Digital.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) Hubungan Internasional.
- c. Sebagai referensi dan patokan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang masih berhubungan dengan skripsi ini.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 2.2 Rumusan Masalah
- 3.3 Tujuan Penelitian
- 4.4 Kegunaan Penelitian
- 5.5 Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

- 2.1 Penelitian Terdahulu
- 2.2 Kerangka Teori
 - 2.2.1 Teori Kerjasama Internasional
 - 2.2.2 Teori Liberal Interdependensi

BAB III Metodologi Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

3.2 Metode Penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.5 Aspek, Dimensi dan Parameter

BAB IV Implementasi Kerjasama Industri E-Commerce Indonesia – Tiongkok Berbasis Ekonomi Digital

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kemajuan Teknologi Berbasis Ekonomi Digital

4.1.2 Roadmap *E-Commerce* Indonesia

4.1.3 Kebijakan Pemerintah Tiongkok dalam Bidang
E-Commerce

4.1.4 Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Bidang E-
Commerce dan Persamaannya dengan Tiongkok

4.1.5 Analisis Kepentingan dari Sektor E-Commerce Indonesia
– Tiongkok

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran